

Pemprov DKI Lepas Ratusan Jemaah Haji Kloter Pertama Asal Jakarta

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepas kloter pertama jemaah asal DKI Jakarta yang berjumlah 388 orang, Sabtu (11/5). Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sekitar 8.000 jemaah akan diberangkatkan dalam dua gelombang.

Dalam siaran pers yang diterima, Minggu (12/5), kloter pertama yang hari ini dilepaskan Pemprov DKI Jakarta melepas berasal dari Jakarta Barat. Dalam pelepasan itu, Widyastuti mengimbau seluruh jemaah mengikuti peraturan yang berlaku.

"Semua arahan dan informasi yang diberikan para petugas untuk dapat diikuti karena sudah dipertimbangkan dengan seksama konsekuensi dari kebijakan yang diambil," ujar Widyastuti di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu.

Jika ada kendala mengenai manasik, kesehatan, maupun bingung sepanjang perjalanan atau di Tanah Suci, jemaah wajib berkon-

sultasi dengan para petugas. Widyastuti menuturkan, imbauan diberikan lantaran ibadah haji sepatutnya memberikan pengalaman yang baik dan positif kepada setiap jemaah. Terlebih, jemaah haji asal Indonesia memiliki porsi yang besar dengan profil jemaah yang beragam.

"Sehingga membutuhkan upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai manasik haji dan umrah," ungkap dia.

Masih berkaitan dengan pengalaman yang positif, Widyastuti mengingatkan agar setiap jemaah menjaga asupan nutrisi. Sebab, ibadah haji adalah ibadah fisik. Jadi, setiap jemaah perlu dalam kondisi kesehatan yang prima. "Ibadah haji adalah ibadah fisik sehingga membutuhkan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan kesehatan yang sempurna," ucap dia.

"Dengan kata lain, jemaah yang diberangkatkan dianggap layak untuk terbang dan menunaikan ibadah haji," lanjut Widyastuti.

● yan

Gerindra Pertimbangkan Emil di Pilkada Jakarta

JAKARTA (IM) - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan jika nama Ridwan Kamil dipertimbangkan pihaknya untuk maju di Pilkada Jakarta. Muzani menyebut arahnya sudah ke sana tinggal mempertimbangkan pilihan wakilnya.

"Ya arahnya sudah cukup tapi kan ada beberapa pilihan untuk wakil dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang sedang dipikirkan sebentar," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (12/5).

"Jawa Timur sudah selesai, kita akan fokus pada kemenangan Ibu

Khofifah, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. DKI Jakarta kita perlu waktu sedikit untuk mengambil kesimpulan siapa yang akan kita majukan," kata dia.

Ia mengatakan untuk Pilkada DKI Jakarta beberapa nama baik internal partai dan eksternal juga dipertimbangkan. Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan.

"Ada yang internal, ada yang eksternal. Internal kan nama-namanya sudah disebut oleh Pak Riza," ujar Muzani.

"Ya (Ridwan Kamil dipertimbangkan)," imbuhnya. ● yan

KPU DKI: Syarat Dukungan Cagub Independen Harus Diunggah di Silon

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan syarat 618.968 dokumen surat dukungan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cagub-Cagub jalur perseorangan atau independen harus diunggah atau diupload melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya kepada awak media pada Minggu (12/5).

Dari keempat bakal calon independen atau perseorangan dalam Pilgub DKI 2024 yakni Darma Pongrekun, Sudirman Said, Pompida Hidayatullah, dan Noer Fajriyansyah seluruhnya sudah meminta akses Silon.

"Keempatnya sudah mengajukan akses silon dan sudah kami berikan. Untuk pendaftaran mereka harus membawa syarat dukungan dari pendukung, kedua syarat untuk calon. Syarat dukungan dari pendukung yaitu surat pernyataan dukungan yang disertai KTP yang diunggah ke dalam silon," tuturnya.

Sedangkan syarat calon bagi penyelenggara Pemilu TNI, Polri, ASN kepala desa wajib menyampaikan surat pengunduran diri. Untuk ASN cukup laporan kepada pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan mengajukan diri sebagai Bakal Calon Gubernur.

"Kalau syarat dukungan pencalonan yaitu sejumlah surat pernyataan dukungan disertai dengan KTP sejumlah 618.968 dokumen. Mereka tidak perlu membawa fisik, cukup diupload di aplikasi Silon. Makanya sudah kami berikan akses silon, sudah kita berikan tanda terima untuk silon,

mereka sudah mulai bisa menginput ke dalam silon," jelas Dody Wijaya.

Tahapan penyerahan syarat tersebut kata Dody sudah berjalan lima hari yakni pada tanggal 8-12 Mei 2024.

"Ini hari terakhir hari kelima, sampai Pukul 23.59 WIB kita terima. Kalau gak ada yang daftar berarti tidak ada calon perseorangan yang daftar, kalau ada nanti kami akan cek apakah berkasnya memenuhi persyaratan, kalau memenuhi persyaratan, akan kami terbitkan tanda terima dan berita acara, nanti akan lanjut ke dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual," lanjutnya.

Dody menyebutkan pihaknya akan menunggu masing-masing paslon selesai mengunggah 618.968 dokumen dukungan melalui Silon dari keempat paslon hingga Minggu 12 April 2024 hingga Pukul 23.59 WIB.

"Minat dari calon perseorangan atau independen ini cukup lumayan, ada empat atau lima orang yang sudah berkonsultasi ke KPU DKI. Dari lima sudah tiga yang mengajukan akses Silon dari Darma Pongrekun, Sudirman Said, dan Pompida Hidayatullah. Itu mengajukan akses silon, tapi kita tunggu nanti apakah syarat dukungannya terpenuhi yang di dalam silon, kita tunggu sampai Pukul 23.59 WIB," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata menetapkan jadwal penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur perseorangan (tanpa dukungan partai politik) dalam Pilgub DKI 2024 selama lima hari. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PENAMPILAN MALIQ & D'ESSENTIALS DI CFD

Ribuan warga menyaksikan penampilan grup band Maliq & D'Essentials yang beraksi saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/5). Penampilan Maliq yang membawakan sejumlah lagu hitsnya tersebut disaksikan ribuan warga masyarakat.

Bos PPI: Duet Anies-Ahok Sampai Kiamat Tak Mungkin Terwujud

Faktornya ada tiga hal. Pertama, secara regulasi Ahok tak bisa maju sebagai cawagub. Lalu, ada konflik ideologis Anies dan Ahok sulit disatukan. Kemudian, soal luka politik efek politik identitas Pilkada Jakarta 2017 yang belum terobati. Dan sejauh ini, belum ada partai yang tertarik dengan duet Anies dan Ahok. Dia menilai duet itu hanya manis di permukaan tapi sulit diwujudkan.

JAKARTA (IM) - Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, berbicara soal duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sangat mungkin di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno justru menilai duet kedua tokoh itu sampai kiamat tidak mungkin terjadi.

"Mustahil. Sampai kiamat tak mungkin terwujud," kata

Adi kepada wartawan, kemarin.

Ada beberapa faktor menurut Adi terkait mustahilnya duet Anies dan Ahok. Pertama, katanya, Ahok tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) berdasarkan peraturan perundang-undangan karena gubernur dilarang untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 7 ayat (2).

"Faktornya tiga hal. Pertama, secara regulasi Ahok tak bisa maju sebagai cawagub. Itu jelas dan fix," kata Adi.

Lalu, kata Adi, ada konflik ideologis Anies dan Ahok sulit disatukan. Kemudian, soal luka politik efek politik identitas Pilkada Jakarta 2017 yang belum terobati.

"Kedua, konflik ideologis keduanya sulit disatukan. Apapun judulnya Anies dinilai sebagai representasi kelompok Islam kanan. Ahok sebaliknya," ujar Adi.

"Ketiga, luka politik efek politik identitas pilkada Jakarta 2017 belum terobati. Apapun judulnya Ahok kalah karena isu agama yang diembuskan kecang pendukung Anies," imbuhnya.

Tak hanya itu, Adi menyebut saat ini belum ada partai yang tertarik dengan duet Anies dan Ahok. Dia menilai duet itu hanya manis di permukaan tapi sulit diwujudkan.

Adi tidak yakin duet itu terlaksana. Jika pun bisa dan dapat tiket maju Pilgub DKI, Adi berkelakar itu bagian dari tanda-tanda kiamat politik sudah dekat.

"Kalau Anies-Ahok bisa duet dan dapat tiket maju Pilkada Jakarta, rasa-rasanya itu bagian dari tanda kiamat politik sudah dekat," tuturnya.

Sebelumnya, menurut Didik, menyatukan Anies-Ahok di Pilgub Jakarta merupakan eksperimen berani. Peluang Anies dan Ahok bersatu sangat mungkin karena beberapa faktor.

Pertama, Anies menurut Didik, seorang yang religius tetapi tidak radikal seperti yang dipersepsikan ketika hadir dalam Pilgub Jakarta 2017. Kedua, menurut Didik sosok Ahok memang temperamental, yang kadang-kadang tabu di dalam politik.

Namun, bagi Didik, sesungguhnya Ahok adalah seorang yang nasionalis dilihat dari sejarah karir politiknya. Ketiga, Didik menilai tidak

ada lagi faktor pendorong keduanya ke arah radikal, karena Anies dinilai sudah bisa tampil di dalam pilpres dengan citra nasionalis religius. Keempat, Ahok juga dinilai akan bisa diterima publik.

"Anies dan Ahok pasti berpikir positif jika paham gagasan seperti ini dari berbagai pihak yang andal menjadikannya simbol kesatuan dari keduanya. Anies masuk Jakarta mempunyai peluang menang sangat besar jika tidak kita katakan hampir 100%," kata Didik dalam keterangannya, Sabtu (11/5) kemarin.

Namun, wacana itu terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Dalam PKPU itu disebutkan seseorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama. Hal ini dijelaskan secara umum oleh Komisiner KPU DKI, Dody Wijaya, saat dihubungi, Sabtu (11/5) kemarin. ● yan

ANGKA KEPUASAN PUBLIK TEMBUS 60 PERSEN LEBIH

Heru Budi Dianggap Layak Jadi Gubernur Jakarta 2024-2029

JAKARTA (IM) - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memiliki angka kepuasan publik lebih dari 60 persen. Hal ini mendapat apresiasi kinerja dari Ketua Umum Rumah Aktivis Institute (RAI), Andri Nurakmal.

Angka kepuasan publik atas kinerja Heru, didapatkan dari penelitian lembaga Arus Survei Indonesia pada 2024.

"Tingkat kepuasan publik tersebut akan kian meningkat lantaran Heru terus menggenarkan program pelayanan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, pengalaman Heru menjadi Pj Gubernur cukup menjadi dasar untuk terus memimpin Jakarta lima tahun ke depan guna menyelesaikan pembangunan berkelanjutan," ujar

Andri dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (12/5).

Menurut Andri, dengan indeks kepuasan publik yang bagus itulah, Heru memiliki cukup modal untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif lima tahun ke depan.

"Setidaknya lima tahun ke depan proses pembangunan DKJ dan Kota Global harus berkelanjutan. Mas Heru ibaratnya sudah meng-ground breaking, tinggal seterusnya pembangunan itu dilanjutkan, tentu idealnya dia harus terpilih lagi," katanya.

Prestasi kepemimpinan Heru di Jakarta dibuktikan dengan beragam penghargaan dari sejumlah lembaga tinggi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Andri mengatakan, Heru mendapatkan penghargaan

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai Tertinggi (A).

Kemudian, penghargaan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Pemprov DKI Jakarta sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi dengan Profil Terbaik. Di bidang pemerintahan, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta meraih piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Selanjutnya, terang Andri, penghargaan Dukcapil Pri-

ma sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ini bukti dalam jangka waktu satu tahun lebih, mas Heru berhasil meletakkan pondasi-pondasi perbaikan kualitas pelayanan untuk juga

Selain itu, Andri menuturkan, dari sisi lingkungan, Heru memiliki political will guna mewujudkan iklim lingkungan yang sehat, bersih, produktif dan hijau. Menurutnya, keseriusan Heru dalam merawat lingkungan dibuktikan dengan pemanfaatan ruang terbuka sebagai lahan tanam produktif melibatkan perangkat pemerintahan serta warga setempat.

"Sebagai wujud keberhasilan dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan pun, DKI kan dapat penghargaan juga dari Kementerian LHK, seluruh kota dan kabupaten dapat Adipura. Jakpus, Jakut, Jaktim, Jakbar, Pulau Seribu dapat Adipura, Jaksel juga dapat. Gak kaleng-kaleng

lah," tuturnya.

Menurut Andri, Pemprov DKI di bawah komando Heru meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tingkat Provinsi di Regional Jawa-Bali, penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Jawa-Bali, hingga Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023.

"Mas Heru juga kan berhasil dengan beberapa pencapaian, seperti dalam hal mendukung program Baznas. Dapat sertifikasi Baznas sebagai Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat. Dapat penghargaan Top Business juga untuk Top Pembina BUMD 2023 atas peran dan kontribusinya membina serta mendukung BUMD," ungkapnya. ● yan



LIBURAN DI TAMAN MAGASATWA RAGUNAN

Sejumlah pengunjung menyaksikan Jerapah (Giraffa) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (12/5). Berdasarkan data pihak pengelola pada periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama pada Kamis (9/5) hingga Minggu (12/5) jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan mencapai lebih dari 115.454 orang.

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT MITRA MEMBANGUN SEJAHTERA (dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Mitra Membangun Sejahtera (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") sebagaimana tertuang dalam Akta No. 02 tanggal 02 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa likuidasi (acquit et de charge) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,
Likuidator